

Pertumbuhan Ekonomi (2010 – TW II 2014) : PDB Menurut Pengeluaran



Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)											
No	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014	
		TW IV 2010 thd TW IV 2009		TW IV 2011 thd TW IV 2010		TW IV 2012 thd TW IV 2011		TW IV 2013 thd TW IV 2012		TW II 2014 thd TW II 2013	
1	Konsumsi Rumah Tangga		4,4		4,9		5,36		5,25		5,59
2	Konsumsi Pemerintah		7,3		2,8		-3,34		6,45		-0,71
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto		8,7		11,5		7,29		4,37		4,53
4	Perubahan Inventori		-28,7		-8,7		94,56		-8,63		-
5	Ekspor		16,1		7,9		0,5		7,4		-1,04
6	Dikurangi: Impor		16,9		10,1		6,79		-0,6		-5,02
	PDB		6,9		6,5		6,11		5,72		5,12

Struktur PDB Menurut Pengeluaran (persen)						
No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	TW II 2014
1	Konsumsi Rumah Tangga	56,7	54,6	54,56	55,82	55,79
2	Konsumsi Pemerintah	9,1	9,0	8,89	9,12	8,02
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,2	32,0	33,16	31,66	31,50
4	Perubahan Inventori	0,4	3,0	4,95	5,4	7,28
5	Ekspor	24,6	26,3	24,26	23,74	23,19
6	Dikurangi: Impor	23,0	24,9	25,81	25,74	25,78
	PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber: BPS

3

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia (2010 – Juni 2014)



Perkembangan Ekspor Indonesia											
No	Uraian	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
		Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y
1	Migas	28.052,7	47,5	41.593,2	48,3	36.973,1	-11,1	32.633,0	11,7	15.689,4	-3,7
2	Nonmigas	129.679,9	33,0	162.023,5	24,9	153.071,5	-5,5	149.934,6	-2,0	73.141,7	-2,2
	Total Ekspor	157.732,6	35,4	203.616,7	29,1	190.044,6	-6,7	182.567,6	-3,9	88.831,1	-2,4

Perkembangan Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang											
No	Penggunaan Golongan Barang	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
		Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y
1	Barang Konsumsi	9.992,6	48,0	13.389,7	34,0	13.415,2	0,2	13.139,9	-2,0	6.297,2	-1,8
2	Bahan Baku/ Penolong	98.697,5	41,7	130.842,9	32,5	140.111,3	7,0	141.956,9	1,3	68.818,2	-4,6
3	Barang Modal	26.916,0	31,7	33.066,7	22,9	38.144,4	15,2	31.534,5	-17,4	14.861,6	-5,8
	Total Impor	135.606,1	40,1	177.299,3	30,7	191.670,9	8,0	186.631,3	-2,6	89.977,0	-4,6

Ekspor dikurangi Impor											
No	Uraian	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
		Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y	Nilai (Juta US\$)	Y-o-Y
1	Ekspor	157.732,6	35,4	203.616,7	29,1	190.044,6	-6,7	182.567,6	-3,9	88.831,1	-2,4
2	Impor	135.606,1	40,1	177.299,3	30,7	191.670,9	8,0	186.631,3	-2,6	89.977,0	-4,6
	Ekspor dikurangi Impor	22.126,5		26.317,4		-1.626,3		-4.063,7		-1.145,9	

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber: BPS

4



Realisasi Investasi Nasional 2010-Juni 2014 (Rp Triliun)

PMDN/ PMA	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
PMDN	60,5	29,0%	76	30,2%	92,2	29,4%	128,2	32,2%	72,8	32,7%
PMA	148	71,0%	175,3	69,8%	221	70,6%	270,4	67,8%	150,0	67,3%
Total	208,5	100%	251,3	100%	313,2	100%	398,6	100%	222,8	100%

Sektor	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	41,0	19,7%	60,5	24,1%	73,8	23,5%	86,8	21,8%	47,65	21,4%
Sekunder	54,8	26,3%	99,6	39,7%	155,8	49,7%	201,0	50,4%	93,65	42,0%
Tersier	112,7	54,1%	91,2	36,3%	83,7	26,7%	110,8	27,8%	81,52	36,6%
Total	208,5	100,0%	251,3	100,0%	313,2	100,0%	398,6	100,0%	222,8	100,0%

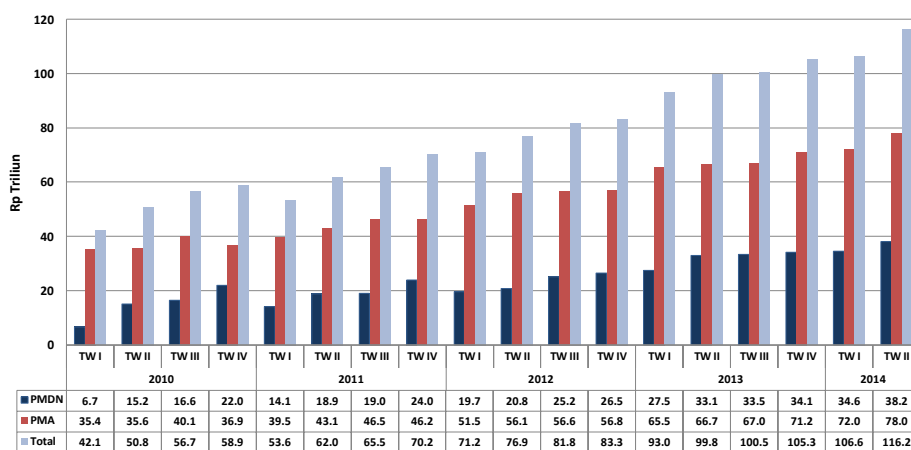
Baru/ Perluasan	2010		2011		2012		2013		Jan-Juni 2014	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Baru	96,0	46,0	112,6	44,8	161,7	51,6	250,8	62,9	153,1	68,7
Perluasan	112,5	54,0	138,7	55,2	151,6	48,4	147,8	37,1	69,7	31,3
Total	208,5	100,0	251,3	100,0	313,2	100,0	398,6	100,0	222,8	100,0

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

5

Perkembangan Realisasi Investasi : Tahun 2010 - Juni 2014

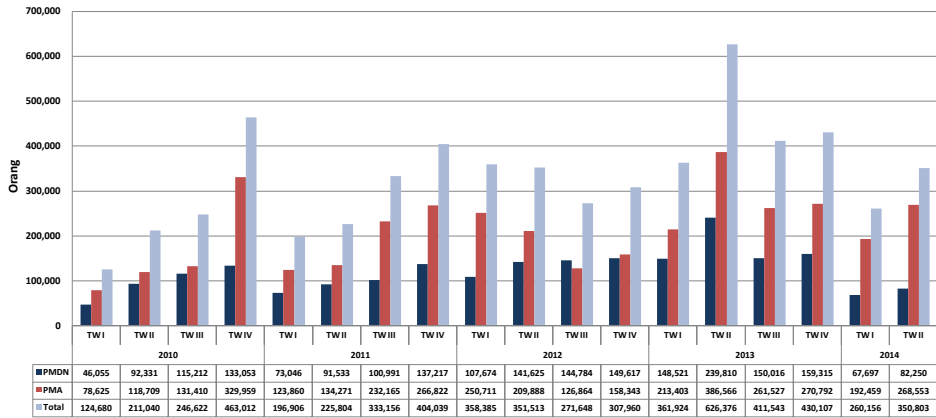
Perkembangan Realisasi Investasi 2010 - Juni 2014 : Per Triwulan



Sumber : BKPM, 2014

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6



Sumber : BKPM, 2014



Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

Upah Minimum Provinsi Tahun 2014



No	PROVINSI	UMP (Rp.)	KHL (Rp.)	UMP/ KHL
1.	ACEH	Rp.1.750.000	Rp.1.726.515	101,36
2.	SUMUT	Rp.1.505.850	Rp.1.265.000	119,04
3.	SUMBAR	Rp. 1.490.000	Rp.1.465.690	101,66
4.	RIAU	Rp.1.700.000	Rp.1.654.224	102,77
5.	KEPRI	Rp.1.665.000	Rp.1.665.000	100,00
6.	JAMBI	Rp.1.502.230	Rp.1.502.230	100,00
7.	SUMSEL	Rp.1.825.600	Rp.1.828.698	99,83
8.	BABEL	Rp.1.640.000	Rp.1.802.823	90,97
9.	BENGKULU	Rp.1.350.000	Rp.1.350.000	100,00
10.	LAMPUNG	Rp.1.399.037	Rp.1.399.037	100,00
11.	BANTEN	Rp.1.325.000	Rp.1.325.000	100,00
12.	BALI	Rp.1.524.600	Rp.1.396.234	110,48
13.	DKI JAKARTA	Rp. 2.441.000	Rp.2.299.860	106,14
14.	NTB	Rp.1.210.000	Rp.1.410.294	85,80
15.	NTT	Rp.1.150.000	Rp.1.600.000	71,88
	Padat Karya	Rp.1.125.000	Rp.1.600.000	70,31
16.	KALBAR	Rp.1.380.000	Rp.1.701.665	81,10
17.	KALSEL	Rp.1.620.000	Rp.1.555.000	104,18
18.	KALTENG	Rp.1.723.970	Rp.2.087.000	82,61
19.	KALTIM	Rp.1.886.315	Rp.1.886.315	100,00
20.	GORONTALO	Rp.1.325.000	Rp.1.639.272	80,83
21.	SULUT	Rp.1.900.000	Rp.1.466.472	129,56
22.	SULTRA	Rp.1.400.000	Rp.1.472.581	95,07
23.	SULTENG	Rp.1.250.000	Rp.1.292.817	96,69
24.	SULSEL	Rp.1.800.000	Rp.1.760.000	102,27
25.	SULBAR	Rp.1.400.000	Rp.1.919.487	72,94
26.	MALUKU	Rp.1.415.000	Rp.2.158.469	65,56
27.	MALUKU UTARA	Rp.1.440.746	Rp.1.800.000	80,04
28.	PAPUA	Rp.1.900.000	Rp.1.907.000	99,63
29.	PAPUA BARAT	Rp.1.870.000	Rp.2.122.472	88,10
	RATA-RATA	Rp.1.563.812	Rp.1.668.639	93,72

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsos,
Kemenakertrans

9



- Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia :
 - Rata – rata Upah Minimum Provinsi(UMP) nasional dan rasio UMP/KHL tahun 2014 sebesar : Rp 1,563 juta dengan rasio 93,72%; dimana tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta = Rp 2,441 juta dengan rasio 106,14%.
 - Terdapat 15 Provinsi menetapkan UMP sama dengan atau diatas KHL (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan).
 - Tingkat kepatuhan dalam membayar upah pekerja sesuai dengan UMP masih rendah.
 - Tingkat partisipasi pekerja terhadap program jaminan sosial masih rendah.
 - Jumlah pekerja informal lebih banyak daripada pekerja formal.
 - Tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih rendah jika dibandingkan Negara-Negara di regional Asia Pasifik (*Worldbank*)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

10



Peluang dan Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia Era MEA 2015

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11



Peluang dan Tantangan Ketenagakerjaan

- Pasar lapangan kerja terbuka luas dengan bebasnya pekerja (dengan keahlian tertentu) keluar masuk ke negara ASEAN;
 - Tenaga kerja Indonesia dapat masuk ke negara-negara ASEAN.
 - Tenaga kerja Asing dari ASEAN juga dapat masuk ke Indonesia.
 - Persaingan mencari pekerjaan lebih ketat karena bersaing dengan pekerja ASEAN lainnya yang ingin bekerja di Indonesia.
- Produktivitas pekerja di Indonesia perlu terus ditingkatkan, sehingga pemberi kerja memilih pekerja Indonesia;
- Menarik pekerja Informal Indonesia (TKI) di negara asing agar bekerja secara formal di Indonesia.
- Semakin besarnya peluang pekerja asing (dengan keahlian tertentu) masuk ke Indonesia, semakin meningkatkan persaingan antar pekerja yang diharapkan mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas pekerja Indonesia.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12



- Tingkat pendidikan pekerja Indonesia yang secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
 - Wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun
 - Revitalisasi BLK dan *Training Center* untuk pekerja.
 - Meningkatkan kemampuan dan keahlian pekerja Indonesia dengan :
 - ✓ Memiliki sertifikat profesi yang sesuai dengan pekerjaannya
 - ✓ Mempelajari bahasa komunikasi yang dipakai di negara yang akan dituju, contoh : Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Jepang (Bagi TKI yang akan ke luar negeri)
- Sektor yang telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi MEA dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), diantaranya adalah :
 - Perhotelan, Restoran dan Pariwisata;
 - Kelautan, Perikanan, Maritim, dan Kehutanan;
 - Perbankan, Teknisi Akuntansi, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Jasa Keuangan;
 - Logam dan Mesin, Teknisi Otomotif, Ketenagalistrikan;
 - Garmen;
 - Geomatika, Telematika;
 - Tenaga Laboratorium Pengujian;
 - Dan lain – lain;

Sumber : *Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2014*

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13



Kebijakan Pengupahan dalam Mendukung Investasi

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

14

Kebijakan Ketenagakerjaan untuk Mendukung Investasi

- Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam membayar upah pekerja dengan memberikan “reward” dan “punishment” bagi yang mematuhi ataupun melanggar.
- Meningkatkan peran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dan pemberi kerja dalam menentukan Upah diatas UM untuk pekerja yang telah berpengalaman dengan mempertimbangkan produktivitas pekerja.
- Meningkatkan rasio penggunaan jaminan sosial, baik jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga dapat melindungi tenaga kerja maupun pemberi kerja.



- Pemerintah perlu mengakselerasi revitalisasi dan memperkuat fasilitas Badan Latihan Kerja (BLK) dan berbagai *training center* untuk pekerja, dalam mendukung proses meningkatkan daya saing dan produktivitas pekerja melalui program Sertifikasi Profesi.
- Tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi profesi yang sesuai agar dapat bekerja di Indonesia, selain untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, juga untuk melindungi pencari kerja Indonesia dalam memperoleh pekerjaan di Indonesia



- Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Produktivitas Nasional perlu dilebur dalam satu lembaga sehingga aspek pengupahan dan peningkatan produktivitas dapat sekaligus dibahas secara bersama.
- Meningkatkan peran Dewan Pengupahan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi sebagai tim riset untuk mengembangkan formula UM.
- Sistem Pengupahan yang diharapkan dapat mencapai tujuan :
 - Melindungi tingkat penghasilan dan standar hidup pekerja.
 - Menjaga daya beli dari upah pekerja.
 - Menjaga pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.



- Berbasis formula sehingga lebih transparan, mudah diprediksi dan dipahami, serta memberi kepastian baik oleh pekerja (diterima oleh pekerja) maupun pemberi kerja (dipenuhi oleh pemberi kerja) harus sederhana dan dapat dilaksanakan.
- Formula memperhitungkan inflasi (daerah/nasional), pertumbuhan PDB, serta ditambahkan dengan koefisien penyesuaian (terutama untuk UM yang masih dibawah KHL).
- Perlu membedakan formula penetapan UM yang masih dibawah KHL dengan UM yang sudah diatas KHL.
- Penetapan kenaikan upah sebaiknya berdasarkan periode waktu tertentu/*multiyears* (tidak setiap tahun).

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi formulasi Upah



1. Inflasi (+)
2. Produktivitas (+)
3. Pengangguran (-)
4. Perekonomian Global (-)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

19

Thank You

Terima Kasih



Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

**Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)**

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t. +62 21 525 2008

f. +62 21 525 4945

e. info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id